



KONSEP PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh
Didin Muhafidin
Universitas Padjadjaran
Email: didin_muhafidin@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses the concept of adaptive future governance and its implications for public policy. This article was created using secondary data from literature studies. Adaptive governance is a concept of institutional theory related to the development of institutions that manage shared assets (especially public resources and various other forms of natural capital). The author argues that the idea of adaptive governance is valuable to economists because it can help understand the factors that together determine the adoption of potential policy solutions that we can design in the future.

Keywords: Adaptive Governance, Public Policy & Resource Management.

PENDAHUALUAN

Tata kelola adaptif adalah konsep dari teori kelembagaan yang berfokus pada evolusi lembaga formal dan informal untuk pengelolaan dan penggunaan aset bersama, seperti sumber daya alam sumber daya bersama dan aset lingkungan yang menyediakan layanan ekosistem. Dengan demikian, gagasan ini mencakup 'efisiensi' dan 'kemampuan adopsi' dari pengaturan kelembagaan yang potensial, berkontribusi pada pemahaman yang lebih jelas tentang opsi untuk mengatasi berbagai jenis kegagalan pasar dan kelembagaan yang dapat menghambat pengembangan dan implementasi opsi kebijakan peningkatan kesejahteraan (Bowles 2003; Ostrom 2005).

Kami menganggap pemerintahan adaptif memiliki peran yang mirip dengan konsep kegagalan pasar dalam ekonomi, tetapi diterapkan pada proses pembelajaran sosial dan pilihan kolektif yang lebih luas, termasuk pilihan kolektif tentang ruang lingkup dan struktur lembaga yang mengatur pilihan tingkat bawah oleh individu dan organisasi. Ini dapat menambah nilai pada kontribusi ekonom sumber daya dan penasihat kebijakan dengan mengartikulasikan teori tindakan kolektif dan pengambilan keputusan politik yang membantu mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi adopsi atau tidak

adopsi rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan; konsisten dengan prinsip utama teori ekonomi; dan (iii) menyediakan jembatan antara ekonomi dan berbagai disiplin ilmu terkait (seperti ekonomi eksperimental dan teori permainan evolusi).

LANDASAN TEORI

1. Asal Usul Pemerintahan Adaptif

Gagasan tata kelola adaptif telah muncul dari persimpangan dua bidang penyelidikan: penerapan teori sistem ekologi untuk pengelolaan sumber daya alam, dikatalisasi oleh karya Buzz Holling dan dilanjutkan oleh Aliansi Ketahanan (lihat Gunderson 2001), dan studi tentang lembaga pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Elinor Ostrom. Kedua literatur ini secara eksplisit integratif, dan literatur tata kelola adaptif menarik banyak ide dari ekonomi politik, ekonomi sumber daya dan lingkungan, ekonomi eksperimental, teori permainan evolusi, teori organisasi, ekologi, teori sistem, dan ilmu sistem yang kompleks.

Gagasan manajemen adaptif diperkenalkan oleh Holling (1978) dan kolaborator sebagai kritik terhadap praktik 'manajemen pakar terpusat' yang berbasis ilmu pengetahuan yang memberi terlalu sedikit perhatian pada kompleksitas dan ketidakpastian proses ekosistem. Alternatif mereka adalah



memahami pengelolaan sumber daya alam sebagai serangkaian percobaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil pengelolaan sumber daya (seperti pasokan ikan atau kayu atau air tawar), dan pemahaman manajer tentang sumber daya dan ekosistem pendukungnya (Downs & Kondolf 2002).

Pemikiran sistem ini bersinggungan dengan karya Ostrom tentang dinamika sosial pengelolaan sumber daya alam, yang didasarkan terutama pada studi pengaturan kelembagaan tradisional untuk irigasi yang dikelola secara intensif dan sumber daya hutan. Pekerjaan pada lembaga pemerintahan sendiri ini secara eksplisit menantang anggapan bahwa tragedi milik bersama paling baik diselesaikan melalui manajemen ahli yang dipaksakan dari luar, mengutip sejumlah contoh pengaturan kelembagaan otonom yang berkembang secara lokal yang telah mempertahankan sumber daya bersama selama berabad-abad, dan mengidentifikasi prinsip atau kondisi umum yang memungkinkan tata kelola dan manajemen adaptif (Ostrom, dkk., 1992; Onyx, 2004, Dietz, dkk.2003).

2. Istilah-Istilah Kunci

Salah satu tantangan kolaborasi multidisiplin adalah bahwa berbagai disiplin ilmu sering menggunakan istilah yang sama untuk mengartikan hal yang berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan yang cukup besar. Untuk menghindari masalah ini, bagian ini menguraikan beberapa istilah kunci yang menopang literatur tata kelola adaptif, khususnya konsep yang mendefinisikan fokus dan batas-batas konsep ini.

Pemerintahan

Tata kelola mengacu pada pengaturan kelembagaan yang membentuk keputusan dan perilaku aktor, termasuk pelaksanaan wewenang dalam kelompok atau organisasi (seperti perusahaan atau negara). Lembaga ditafsirkan sebagai termasuk aturan dan norma (Ostrom 2005). Aturan mengacu pada prinsip-prinsip yang dapat ditegakkan secara formal, seperti hukum yang dibuat oleh undang-undang atau preseden

common law dan didukung oleh berbagai bentuk sanksi hukum. Dalam beberapa kasus, analisis akan membedakan antara 'aturan dalam operasi' (yang berdampak pada perilaku) dan 'aturan dalam hukum' (yang tidak selalu dipatuhi atau ditegakkan). Norma mengacu pada sikap, nilai, dan tradisi budaya yang dimiliki bersama yang dipelihara dan ditransmisikan oleh berbagai macam penghargaan positif dan negatif (seperti penghargaan, akses ke sumber daya, dukungan sosial, dan pengaturan pembagian risiko). Gagasan tentang institusi juga ditafsirkan untuk memasukkan, tetapi biasanya tidak menekankan, organisasi dan lembaga pemerintah (seperti Pengadilan Tinggi Australia, New York Times, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Dewan Pertanahan).

Ini menyiratkan bahwa tata kelola beroperasi pada berbagai tingkatan dan bergantung pada berbagai sumber kewenangan yang mendasarinya (Shearing dan Wood 2003, Blanchet dkk 2017). Perilaku perusahaan, misalnya, diatur oleh undang-undang negara, dan oleh harapan pemegang saham. Perilaku individu dalam perusahaan diatur oleh budaya dan norma-norma perusahaan, kebijakan perusahaan formal (termasuk sistem imbalan), hukum eksternal, dan sikap sosial yang lebih luas. Berbagai pengaruh ini sering menimbulkan ketegangan. Pemerintahan pada dasarnya bersifat cair, menengahi negosiasi formal dan informal dari keputusan antara aktor dengan berbagai bentuk dan tingkat pengaruh seperti yang diberikan oleh kantor, sumber daya, informasi, kedudukan publik, dan faktor lainnya (Voss & Kemp, 2006).

Manajemen

Manajemen-berbeda dengan tata kelola-mengacu pada proses pengambilan keputusan, koordinasi dan penyebaran sumber daya yang terjadi dalam pengaturan kelembagaan tertentu, dengan asumsi tidak ada perubahan dalam aturan dan norma. Manajemen terkait erat dengan upaya memimpin atau mengarahkan, dan dapat dianggap melibatkan identifikasi strategi yang diinginkan (melalui penerapan keterampilan dan pengetahuan), dan menerapkannya melalui



aktivitas fisik dan teknologi (lihat Shearing dan Wood 2003). Konsisten dengan ini, dalam literatur tata kelola adaptif 'manajemen' hampir selalu mengacu pada situasi kontrol langsung terhadap sumber daya dan perilaku agen, daripada situasi di mana satu agen atau kelompok agen memiliki pengaruh atau 'kontrol tidak langsung' atas keputusan atau perilaku orang lain (yang biasanya merujuk pada tata kelola dan bukan manajemen).

Pendukung manajemen adaptif fokus terutama pada elemen pertama manajemen - identifikasi strategi - dan menarik perhatian ke berbagai ketidakpastian dan potensi jebakan. Ini termasuk: pentingnya memahami dinamika sistem dan hubungan antara variabel sistem, bahwa ambang batas sistem mungkin tidak jelas sebelum dilintasi (setelah itu pemulihan mungkin sulit atau tidak mungkin), bahwa variabilitas merupakan fitur yang melekat dan penting dari sistem ekologis, dan bahwa sumber daya dan peristiwa jarang didistribusikan secara merata melalui ruang atau waktu (Holling, 1986). Ini menunjukkan (i) bahwa strategi masa depan harus didasarkan, setidaknya sebagian, pada pelajaran yang diperoleh dari tinjauan dampak dan efektivitas tindakan manajemen masa lalu, dan (ii) bahwa strategi manajemen saat ini harus melibatkan tingkat eksperimen untuk mengurangi risiko yang terkait dengan tindakan saat ini dan untuk meningkatkan basis informasi untuk keputusan di masa depan. Dalam praktiknya, mencapai perubahan-perubahan dalam manajemen ini memerlukan perubahan dalam tata kelola, terutama melalui perubahan insentif bagi para manajer dan struktur manajemen formal.

Adaptasi

Adaptasi mengacu pada proses perubahan yang tidak dikelola, namun sistematis, sebagai respons terhadap tekanan kompetitif. Dalam teori evolusi, suatu spesies bersifat adaptif jika telah berevolusi dengan cara yang meningkatkan kelangsungan hidup spesies di bawah berbagai kondisi lingkungan (melalui keberhasilan reproduksi organisme individu). Spesies yang gagal bertahan tidak adaptif. Dengan demikian

adaptasi adalah proses sistematis spontan yang melaluinya kinerja suatu spesies atau organisme ditingkatkan sehubungan dengan kriteria tertentu. Dawkins (1976) dan lainnya (So Mers & Rosenberg, 2003) berpendapat bahwa proses evolusi ini akan terjadi di mana saja karakteristik direplikasi dengan variasi dan tunduk pada tekanan seleksi.

Perubahan dalam sistem sosial umumnya dianggap adaptif jika mereka meningkatkan kemanjuran pengaturan sosial - yaitu, jika mereka meningkatkan kepuasan kebutuhan dan preferensi orang-orang yang menjadi dasar pengaturan tata kelola lembaga untuk operasi dan legitimasi mereka. Kriteria kinerja untuk menilai apakah suatu perubahan institusional adaptif dengan demikian mencakup apakah ia mempromosikan kesejahteraan manusia atau pencapaian hasil yang dihargai oleh manusia, serta kelangsungan hidup manusia sebagai suatu spesies.

Pemerintahan Adaptif

Pemerintahan adaptif dengan demikian mengacu pada cara-cara di mana pengaturan kelembagaan berkembang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang berubah. Secara lebih formal, kami mendefinisikan tata kelola adaptif sebagai berikut: Tata kelola adaptif mengacu pada evolusi aturan dan norma yang mempromosikan kepuasan kebutuhan dan preferensi manusia yang mendasari perubahan yang diberikan dalam pemahaman, tujuan, dan konteks sosial, ekonomi dan lingkungan.

Catatan penting pertama adalah bahwa kriteria normatif yang digunakan untuk menilai apakah perubahan dalam pengaturan tata kelola adalah 'adaptif' atau 'baik' berasal dari nilai-nilai dan preferensi konstituensi, daripada dipaksakan oleh analisis. Akan tetapi, banyak literatur membahas 'masalah jahat', di mana kriteria untuk mengevaluasi opsi sendiri diperdebatkan, dan berkembang dengan cara yang tidak terduga (Calogero 2009, Ritchey 2013). Dimana hal ini terjadi sebagaimana didalilkan oleh Qizilbash (2007), nilai-nilai diungkapkan baik melalui institusi yang dipilih orang melalui aksi kolektif,



maupun oleh pilihan yang mereka buat sebagai individu.

Catatan kedua adalah bahwa evolusi aturan dan norma tidak perlu disadari atau disengaja, atau diartikulasikan dalam istilah berorientasi tujuan, agar dapat adaptif. Sebagaimana dibahas di bawah ini, ini menyiratkan bahwa mencapai perbaikan dalam kemanjuran pengaturan kelembagaan pada umumnya akan memerlukan pengembangan strategi aksi kolektif yang baik 'peningkatan efisiensi' dan 'dapat diadopsi', memberikan keuntungan kesejahteraan netto (seperti yang ditentukan secara konvensional) dan secara politis menarik di struktur keputusan dan kerangka waktu yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisa kualitatif deskriptif dengan melakukan tinjauan pustaka dan menggunakan data sekunder yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Kemungkinan adanya bias tetap akan menjadi fokus penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan dengan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Jelas dari pembahasan di atas bahwa literatur tata kelola adaptif banyak mengacu pada konsep-konsep dari ekonomi, khususnya ekonomi sumber daya dan lingkungan, ekonomi kelembagaan, perspektif pilihan publik tentang pengambilan keputusan kolektif, dan teori permainan evolusi. Namun, literatur tata kelola adaptif melengkapi teori ekonomi, alih-alih berusaha menggantikannya, dan dapat dibedakan dari ekonomi dalam hal itu berfokus terutama pada bagaimana lembaga formal dan informal membentuk perilaku sosial dan kolektif, daripada bagaimana individu dan perusahaan berperilaku dan menganggap nilai dalam pasar dan pengaturan hukum terkait (yang merupakan seperangkat institusi khusus).

2. Pendekatan untuk Mengatur Sumber Daya Bersama

Argumen sentral dari para kritikus adalah bahwa penerapan 'manajemen ilmiah' pada sistem alami sangat tidak ilmiah. Kompleksitas proses ekologi berarti bahwa kajian disiplin reduksionis tentang komponen-komponen sistem akan selalu berjuang untuk memberikan wawasan yang berguna tentang sifat-sifat tingkat sistem yang muncul dari sistem sosial dan lingkungan terkait (Holling 1986). Oleh karena itu tidak layak untuk membangun basis pengetahuan yang diperlukan untuk sepenuhnya memprediksi dan mengendalikan sistem ini (Jiggins & Roling, 2002). Selain itu, budaya sains dan insentif disiplin sering mengurangi terhadap seluruh sistem pendekatan dan fleksibilitas administrasi, dan tujuan manajemen risiko dan proses yang dibentuk untuk melayani kepentingan para ilmuwan, daripada menyelaraskan ilmu pengetahuan untuk mendukung manajemen yang tepat (Hornung 2012; Nelson, dkk., 2008).

Fokus pada masalah-masalah yang terkait dengan manajemen pakar terpusat dan manfaat tata kelola adaptif menghasilkan kecenderungan untuk menggambarkan pendekatan ini sebagai dua ujung spektrum - setidaknya pada prinsipnya - sambil mencatat bahwa dalam praktiknya mereka dapat hidup berdampingan pada skala yang berbeda atau dalam kaitannya. Untuk berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam di suatu wilayah (Hornung, 2012).

Kami menganggap tipologi ini, meski bermanfaat, berisiko mengaburkan dua hal penting. Pertama, pendekatan manajemen ini dicirikan oleh perbedaan di berbagai sikap dan asumsi, seperti dirangkum dalam Tabel 1. Ini menunjukkan spektrum yang ditandai oleh kelompok masalah daripada kontinum sederhana yang digambarkan oleh variabel tunggal.

Kedua, dan yang lebih penting, pemerintahan adaptif menegaskan jalan tengah yang berantakan, daripada mengadvokasi beberapa cita-cita utopis. Literatur telah berkembang melalui pengamatan empiris yang cermat dan refleksi tentang realitas-realitas yang membingungkan. Kritik tata kelola adaptif



manajemen pakar terpusat tidak menyiratkan bahwa manajemen sumber daya harus sepenuhnya didesentralisasi dan dipercayakan kepada non-ahli. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa praktik manajemen telah melampaui, bergerak dari satu ekstrem ke yang lain. Oleh karena itu kami pikir lebih berguna untuk menganggap pemerintahan adaptif sebagai duduk di antara dua alternatif kutub: manajemen ahli terpusat dan pandangan romantis bahwa masyarakat pra-industri secara alami hidup seimbang dengan alam. Sementara alternatif kutub ini cacat dengan cara yang berbeda, mereka disatukan oleh pengabaian nuansa dan kompleksitas motivasi dan institusi manusia, dan kegagalan untuk mengenali bahwa semua perilaku dipengaruhi oleh efek insentif implisit atau eksplisit.

Tabel 1. Ikhtisar Pendekatan Untuk Mengelola Sumber Daya Alam

Pendekatan:	Pakar terpusat	Adaptif	Romantis
	pengelolaan	pemerintahan	agrarianisme (a)
Ringkasan:	Seragam terpusat	Berkembang banyak	Terdesentralisasi
	manajemen berdasarkan	sumber yang diperebutkan	pengelolaan sumber daya
Asumsi:	ilmu biofisik	pemerintahan	diinformasikan oleh tradisi
Pengetahuan yang disukai	Disiplin berbasis silo	Berbagai jenis dan sumber pengetahuan	Tradisional lokal
dasar untuk mengelola sumber daya alam:	keahlian dan ilmiah	menambah nilai pada keputusan	pengetahuan dan bea cukai
Motivasi dominan individu:	Minat diri sendiri	Campuran timbal balik motif, mendukung	Berorientasi hubungan, kepentingan diri yang bijaksana
		menyangkut diri sendiri dan 'lain tentang '	dengan perhatian penghargaan masyarakat dan status (b)
		motivasi sesuai keadaan	

Kapasitas untuk	Individu adalah	Individu yang mampu	Individu biasanya
koordinasi:	tidak kooperatif	kerjasama dan mandiri	kooperatif
		tindakan yang berorientasi	
Unit primer dari pemerintahan:	Lembaga negara pusat berdasarkan ilmiah keahlian	Pengelompokan berganda dan minat	Individu tertanam dalam komunitas dan tradisi
Sumber otoritas dan legitimasi:	Dipaksakan secara eksternal kekuatan pemerintah dan sumber daya	Cairan berbagai sumber dukungan	Dukungan internal diekspresikan melalui tradisi dan adat
			Dapat didukung oleh agama atau spiritualitas
Tinjau siklus:	Perubahan strategi	Tujuan, konteks, pengetahuan dan	Tradisi menyediakan panduan abadi untuk berbagai keadaan
	diharapkan kecil dan jarang	Strategi semuanya cair	

(a) Romantisisme lingkungan dicirikan oleh asumsi yang sama.

(b) Romantisisme lingkungan juga menekankan kerohanian dan menghormati leluhur.

Pada akhirnya, tugasnya adalah menggunakan kerangka kerja analitis yang sesuai dengan karakteristik paling penting dari masalah yang ditangani. Manajemen pakar yang terpusat mungkin bekerja dengan baik untuk masalah teknik dan sistem yang dikontrol ketat (seperti jalur produksi pabrik yang awalnya dikembangkan oleh pendekatan ini), sementara agraria yang romantis mungkin berguna untuk rezim pengelolaan sumber daya dengan keragaman sosial atau ekologi lokal yang sangat tinggi dan ketahanan yang cukup besar dalam kaitannya dengan tekanan dominan.



3. Wawasan tentang Faktor-Faktor yang Memfasilitasi Tata Kelola Adaptif

Seperti yang diuraikan di atas, sebagian besar literatur tata kelola adaptif berfokus pada pengaturan ekstraksi sumber daya terbarukan bersyarat yang tertanam dalam sistem sosial dan alam adaptif yang kompleks. Dalam istilah yang sangat umum, literatur meneliti potensi untuk merestrukturisasi lembaga pemerintahan sehingga sumber daya bergeser dari pengaturan 'secara umum' (saingan tetapi tidak dapat dikecualikan) ke kondisi 'klub yang baik' (di mana definisi akses yang lebih ketat memungkinkan pemantauan tingkat umum dari ekstraksi oleh individu).

Banyak ekonom menganggap bahwa permintaan warga terhadap kualitas lingkungan adalah barang superior, meningkat seiring dengan pendapatan, dan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan cenderung mengarah pada peningkatan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu (Martínez-Alier, 1995). Perbaikan seperti itu umumnya akan memerlukan perubahan kebijakan, karena karakteristik barang publik yang kuat dari kualitas lingkungan. Ini, pada gilirannya, bergantung pada tiga faktor utama: (i) kondisi lingkungan dapat dilihat, dengan hubungan sebab dan akibat yang dipahami dengan baik; (ii) 'kerusakan lingkungan' dapat dibalik dan tunduk pada pengaruh manusia; dan (iii) skala spasial dan temporal dari masalah memungkinkan pengaturan untuk dibuat yang menghasilkan manfaat bersih yang dirasakan untuk konstituensi utama (Arrow, dkk., 1996).

Hampir secara definisi, kondisi ini terutama yang terakhir tidak berlaku untuk banyak masalah lingkungan kita yang paling sulit ditangani, seperti salinitas lahan kering atau perubahan iklim. (Memang, jika kondisi ini memang menahan masalah tidak akan sulit secara politik). Wawasan utama bagi para ekonom dan teknisi kebijakan adalah bahwa adopsi kebijakan diatur oleh pengetahuan, sikap, dan ekonomi politik yang semuanya berkembang seiring waktu. Pengetahuan memotivasi tindakan dan memiliki pengaruh moral (yang kadang-kadang

membuat orang menghindari memperoleh pengetahuan yang dapat membatasi perilaku mereka, lihat Danna et al 2005).

Ini menarik perhatian pada peran berbeda yang dimainkan oleh pengetahuan dan 'spesialis pengetahuan' termasuk ekonom, analis kebijakan, dan ilmuwan biofisik dalam pembentukan kebijakan publik. Peran pertama ini berfokus pada ekonomi politik dari perubahan kebijakan, yang biasanya membutuhkan masalah untuk ditunjukkan dan diterima oleh masyarakat umum sebelum pemerintah dapat mengambil tindakan tegas. Peran kedua dari pengetahuan khususnya pengetahuan para ahli - adalah untuk menginformasikan secara detail keputusan-keputusan spesifik, begitu 'lisensi untuk memerintah' ini telah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Argumen sentral kami adalah bahwa gagasan tata kelola adaptif bernilai bagi para ekonom karena dapat membantu kita memahami faktor-faktor yang secara bersama menentukan adopsi solusi kebijakan potensial yang dapat kita rancang. Literatur tata kelola adaptif melengkapi dan memperluas ekonomi, menyediakan lensa untuk menganalisis 'kemampuan beradaptasi' dari kemungkinan perubahan kebijakan serta 'efisiensi' mereka. Karena itu, ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang pasar untuk salah satu produk utama kita rekomendasi kebijakan dan membantu kita menjadi lebih efektif dalam keterlibatan kita dengan masalah kebijakan. Wawasan khusus untuk para peneliti (dan 'pekerja pengetahuan' lainnya) adalah bahwa mereka memainkan dua peran berbeda dalam membantu resolusi keputusan yang diperebutkan secara sosial. Yang pertama adalah untuk berkontribusi pada proses sosial pembangunan konsensus di sekitar kebutuhan atau sebaliknya untuk tindakan kolektif. Ini menopang 'lisensi untuk beroperasi' politik yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap masalah yang kontroversial. Yang kedua lebih akrab bagi para ekonom dan penasihat kebijakan, dan berfokus



pada memberikan lebih banyak saran teknis yang membantu menginformasikan detail tentang bagaimana cara terbaik mengimplementasikan mandat itu.

Meskipun berbeda, literatur tata kelola adaptif juga berbagi landasan bersama yang substansial dengan prinsip-prinsip penting ekonomi. Individu pada dasarnya dianggap sebagai aktor rasional yang mengejar campuran tujuan dalam lingkungan keputusan yang mencakup aktor strategis independen lainnya. Lingkungan pengambilan keputusan perusahaan, pasar, dan badan pengatur tersebut berkembang seiring waktu sebagai respons terhadap tekanan kompetitif dan umpan balik sumber daya. Informasi seringkali tidak sempurna dan tidak merata. Nilai-nilai juga bervariasi antar individu dan kelompok.

Literatur juga menyediakan kerangka kerja integratif yang berguna untuk analisis masalah kebijakan, menyediakan jembatan untuk disiplin terkait (seperti pilihan publik, ekonomi eksperimental, dan psikologi perilaku) sambil mempertahankan inti intelektual yang koheren. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa gagasan pemerintahan adaptif memiliki potensi untuk memainkan peran yang mirip dengan konsep kegagalan pasar dalam ekonomi, tetapi diterapkan pada dinamika kelembagaan dan proses pembelajaran sosial dan pilihan kolektif yang terkait. Digabungkan dengan ekonomi, ini dapat memberikan kontribusi yang kuat untuk memahami berbagai hambatan untuk kebijakan publik yang responsif, dan membantu pengembangan opsi yang efektif untuk mengatasi berbagai jenis kegagalan pasar dan kelembagaan yang jika tidak akan menghambat pengembangan dan implementasi peningkatan kesejahteraan opsi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arrow, K., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C. S., ... & Pimentel, D. (1996). Economic growth, carrying capacity, and the environment. *Environment and Development Economics*, 1(1), 104-110.
- [2] Blanchet, K., Nam, S. L., Ramalingam, B., & Pozo-Martin, F. (2017). Governance and capacity to manage resilience of health systems: towards a new conceptual framework. *International Journal of Health Policy and Management*, 6(8), 431.
- [3] Bowles, S., 2003, *Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution*, Princeton University Press, Princeton and Oxford
- [4] Calogero, P. (2009). Dilemmas in a General Theory of Fieldwork. *Berkeley Planning Journal*, 22(1).
- [5] Downs, P. W., & Kondolf, G. M. (2002). Post-project appraisals in adaptive management of river channel restoration. *Environmental Management*, 29(4), 477-496.
- [6] Gunderson, L. H. (2001). *Panarchy: understanding transformations in human and natural systems*. Island Press.
- [7] Holling, C. S. (1986). Adaptive environmental management. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 28(9), 39-39.
- [8] Hornung, S. (2012). *Beyond "New Scientific Management" Critical reflections on the epistemology of evidence-based management*. In *The Oxford handbook of evidence-based management*.
- [9] Jiggins, J., & Röling, N. (2002). Adaptive management: potential and limitations for ecological governance of forests in a context of normative pluriformity. *Adaptive Management: From theory to practice*, 3, 93.
- [10] Larson, T., & Capra, C. M. (2009). Exploiting moral wiggle room: Illusory preference for fairness? A comment. *Judgment and decision Making*, 4(6), 467.
- [11] Nelson, R., Howden, M., & Smith, M. S. (2008). Using adaptive governance to rethink the way science supports Australian drought policy. *Environmental science & policy*, 11(7), 588-601.
- [12] Onyx, J. (2004). The Relationship between Social Capital and Sustainable Practices: Revisiting "The Commons". *Sustainability*



-
- and Social Science: Round Table Proceedings, 41-57.
- [13] Ostrom, E, J. Walker and R. Gardner, 1992, 'Covenants with and without a sword: Self-governance is possible'. *American Political Science Review* 86(2): 404-417
- [14] Ostrom, E., 2005, *Understanding Institutional Diversity*, Princeton University Press, Princeton
- [15] Qizilbash, M. (2007). Social choice and individual capabilities. *Politics, Philosophy & Economics*, 6(2), 169-192.
- [16] Ritchey, T. (2013). Wicked problems. *Acta morphologica generalis*, 2(1).
- [17] Shearing, C., & Wood, J. (2003). Nodal governance, democracy, and the new 'denizens'. *Journal of law and society*, 30(3), 400-419.
- [18] Sommers, T., & Rosenberg, A. (2003). Darwin's nihilistic idea: evolution and the meaninglessness of life. *Biology and Philosophy*, 18(5), 653-668.
- [19] Voss, J. P., Bauknecht, D., & Kemp, R. (Eds.). (2006). *Reflexive governance for sustainable development*. Edward Elgar Publishing.